



## LAPORAN SINGKAT KOMISI VIII DPR RI

**Bidang Kementerian Agama RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

---

Tahun Sidang : 2014-2015

Masa Persidangan : II

Rapat ke : 5

Jenis Rapat : Rapat Kerja

Sifat rapat : Terbuka

Hari/tanggal : Selasa, 27 Januari 2015

Waktu : 19.30 – 24.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI (Ged.Nusantara II Lt. 2)

Rapat dengan : Menteri Agama RI

Acara : Membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2014, Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun 2014, Paparan Program Kerja Tahun 2015 serta Isu-isu Aktual.

Ketua Rapat : **Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum.,MA.**

Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto,SH

Hadir : 38 Anggota dari 45 Anggota Komisi VIII DPR RI

### KESIMPULAN/KEPUTUSAN

#### I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI, Selasa, 27 Januari 2015 dibuka pukul 19.30 WIB, dan di Pimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Bpk. Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum.,MA., Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Pimpinan Rapat menyampaikan agenda Rapat Kerja kepada Menteri Agama RI serta berbagai hal yang terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2014, Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun 2014, Paparan Program Kerja Tahun 2015 serta Isu-isu Aktual.

## II. PEMBAHASAN

1. Pendahuluan
2. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2014
3. Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun 2014
4. Paparan Program Kerja Tahun 2015 serta Isu-isu Aktual

### KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI yang mengagendakan “**Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2014, Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun 2014, Paparan Program Kerja Tahun 2015 serta Isu-isu Aktual,**” maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2014 Kementerian Agama RI dengan realisasi anggaran mencapai **Rp45.446.830.946.845** (*Empat Puluh Lima Triliun Empat Ratus Empat Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*). Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI mendorong Kementerian Agama RI untuk memberikan laporan evaluasi program secara detail serta meningkatkan penyerapan anggaran tahun 2015.
2. Komisi VIII DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Agama RI yang telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) pada pemeriksaan semester I BPK RI Tahun 2014. Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama RI agar menindaklanjuti dan menjadikan temuan dan rekomendasi BPK RI tersebut sebagai pembelajaran dalam melakukan realisasi APBN Tahun 2015.
3. Komisi VIII DPR RI dapat menerima penjelasan Menteri Agama RI mengenai pagu alokasi anggaran Kementerian Agama RI tahun 2015 sebesar **Rp56.440.034.019.000-**, (*Lima Puluh Enam Triliun Empat Ratus Empat Puluh Miliar Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Belas Ribu Rupiah*).
4. Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama RI agar menyampaikan data sebaran program Kementerian Agama RI dalam pembahasan APBN-P tahun 2015.
5. Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama RI untuk menyusun rincian rencana perubahan anggaran Kementerian Agama RI tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pemanfaatan penghematan anggaran perjalanan dinas/meeting konsinyering untuk penajaman kegiatan prioritas nasional dan pemenuhan anggaran tunjangan kinerja PNS Kementerian Agama RI sebesar Rp5.266.474.604.000-, (*Lima Triliun Dua Ratus Enam Puluh Enam Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Ribu Rupiah*); dan
  - b. Tambahan anggaran untuk menambah jumlah penerima manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebesar Rp436.934.000.000-, (*Empat Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah*).

6. Terkait pelaksanaan APBN tahun 2015, Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama RI memperhatikan pendapat dan pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, antara lain:
- a. Pengisian kekosongan jabatan-jabatan strategis di lingkungan Kementerian Agama RI hendaknya dilakukan secara profesional, adil, dan transparan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - b. Mengintensifkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah untuk meningkatkan perlindungan umat beragama serta mengalokasikan anggaran kerukunan umat beragama secara proporsional.
  - c. Tunjangan profesi pendidik di lingkungan Kementerian Agama RI agar dijadikan prioritas dalam APBN-P Kementerian Agama RI tahun 2015.
  - d. Pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) di lingkungan Kementerian Agama RI hendaknya tepat sasaran dan berdasarkan data yang telah divalidasi.
  - e. Penguatan aspek legislasi dan anggaran bagi madrasah diniyah sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan.
  - f. Meningkatkan pembinaan keagamaan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
  - g. Menyelesaikan distribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) biaya nikah pada pencatat nikah yang telah dilaporkan.
  - h. Peningkatan alokasi anggaran untuk lembaga pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Agama RI.
  - i. Mempercepat pematapan pengelolaan haji dengan pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sesuai dengan waktu yang ditetapkan Undang-undang.
  - j. Memberikan apresiasi terhadap implementasi kurikulum 2013 dalam mata pelajaran agama di lingkungan Kementerian Agama RI dengan memenuhi semua persyaratannya.
  - k. Meningkatkan mutu dan mempertegas jati diri madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam.
  - l. Mempertimbangkan penambahan Direktorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Agama RI.
  - m. Pentingnya membuat profil umat beragama dan *roadmap* pembangunan keagamaan.
  - n. Segera menyelesaikan Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

**Rapat ditutup pukul 24.00 WIB**

Jakarta, 27 Januari 2015

AN.KETUA RAPAT/  
SEKRETARIS,

ttd.

YANTO SUPRIYANTO  
NIP. 196305241992031001